

Analisis Keputusan Rusia dalam Operasi Militer Khusus ke Ukraina 2022 melalui Pendekatan *Decision-Making Theory*

Putri Diah Wahyuningtias, Prihandono Wibowo*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

*prihandono_wibowo.hi@upnjatim.ac.id

Abstract

This study aims to analyze Russia's decision to launch Special Military Operations against Ukraine in 2022 using a Decision-Making Theory approach. The primary background of this research is the geopolitical tension related to Ukraine's potential NATO membership, which was perceived as a direct threat to Russia's national security. The method employed in this study is a qualitative analysis based on a literature review, including official documents, academic articles, and other secondary data sources. The findings reveal that Russia's decision was influenced by a security dilemma stemming from NATO's expansion in Eastern Europe and Ukraine's increasing dependence on the West. From an economic perspective, Ukraine's reliance on Russian energy resources became one of the strategic factors in this decision. The study shows that Russia's decision was driven not only by external factors, such as NATO, but also by internal factors, including domestic political support and strong military capabilities. In conclusion, Russia's decision to launch military operations was a preventive measure to maintain its influence in Eastern Europe, safeguard its national interests, and prevent Ukraine from joining NATO, which is perceived as a long-term threat to Russia's security.

Keywords: Russia; Ukraine; NATO; Foreign Policy; Decision-Making; Security

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keputusan Rusia dalam melancarkan Operasi Militer Khusus terhadap Ukraina pada tahun 2022 menggunakan pendekatan *Decision-Making Theory*. Latar belakang utama adalah ketegangan geopolitik terkait potensi keanggotaan Ukraina dalam NATO yang dianggap sebagai ancaman langsung bagi keamanan nasional Rusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan studi literatur yang mencakup dokumen resmi, artikel ilmiah, dan sumber data sekunder lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan Rusia dipengaruhi oleh dilema keamanan yang disebabkan oleh ekspansi NATO di Eropa Timur dan meningkatnya ketergantungan Ukraina pada Barat. Dari perspektif ekonomi, ketergantungan Ukraina pada sumber daya energi Rusia menjadi salah satu faktor strategis dalam keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Rusia tidak hanya didorong oleh faktor eksternal, seperti NATO, tetapi juga oleh faktor internal, termasuk dukungan politik domestik dan kapabilitas militer yang kuat. Kesimpulannya, keputusan Rusia untuk melancarkan operasi militer adalah langkah preventif untuk menjaga pengaruhnya di kawasan Eropa Timur, melindungi kepentingan nasional, dan mencegah Ukraina bergabung dengan NATO yang dinilai dapat merugikan keamanan Rusia secara jangka panjang.

Kata Kunci: Rusia; Ukraina; NATO; Kebijakan Luar Negeri; Pengambilan Keputusan; Keamanan

Pendahuluan

Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia mengumumkan diberlakukannya Operasi Militer Khusus terhadap Ukraina dan melakukan pengeboman terhadap beberapa kota Ukraina seperti Odessa, Kyiv, Kharkiv, dan Mariupol. Pasca pengeboman, terlihat pergerakan tentara Rusia dari berbagai arah, dari Belarus menuju Kyiv di utara, Kharkiv di barat laut, Krimea di selatan, dan Donetsk serta Luhansk di tenggara. Kejadian ini mengakibatkan jatuhnya korban baik dari sipil maupun militer. Selain korban yang berjatuhan, sepertiga populasi warga Ukraina berpindah untuk mencari tempat aman dan meninggalkan negaranya, mencatat peristiwa ini menjadi krisis pengungsi terparah di Eropa setelah Perang Dunia II (Gerlach & Ryndzak, 2022).

Rusia dan Ukraina memiliki sejarah konflik yang rumit meskipun keduanya pernah bersama dalam kesatuan Uni Soviet. Eskalasi konflik terus terjadi sejak awal kedaulatan Ukraina, sampai pada tahun 2021 ketika Ukraina mendesak keanggotaannya dalam NATO dan mengundang respon negatif Rusia berupa kebijakan militer terhadap Ukraina di tahun 2022. Respon keras Rusia dalam menanggapi keinginan Ukraina menjadi anggota NATO dinilai karena hal tersebut dinilai merupakan ancaman bagi kepentingan Rusia, dan Rusia tidak pernah mentolerir agenda apapun yang berpotensi membahayakan negaranya. Vladimir Putin menyatakan *If we see that certain threats are being created, especially in security, we must certainly decide what to do about it*. Rusia akan melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan netralitas Ukraina, agar Ukraina tetap berada dalam lingkup *influence* Rusia dan tidak masuk kedalam kubu aliansi Barat.

Rusia memandang NATO sebagai aliansi ofensif Barat dan berpotensi membahayakan keamanan nasionalnya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai dokumen keamanan Rusia yang sejak tahun 1993 hingga saat ini kerap mengidentifikasi NATO sebagai *potential threat*, sehingga harus dijauhkan dari wilayah dalam pengaruh Rusia termasuk Ukraina (Maitra, 2021). Bergabungnya Ukraina ke NATO dinilai akan merugikan Rusia, sehingga Rusia berusaha mengantisipasi dengan mencegah terlaksananya agenda tersebut. Penelitian oleh Nasya Quilim (2022) membahas *proxy war* Rusia dan Amerika Serikat dalam konflik internal Ukraina, mengeksplorasi bentuk dan dampaknya. Penelitian ini menggunakan konsep *power relationship* dan *proxy war*, serta jangkauan tahun 2014-2021 (Quilim, 2022).

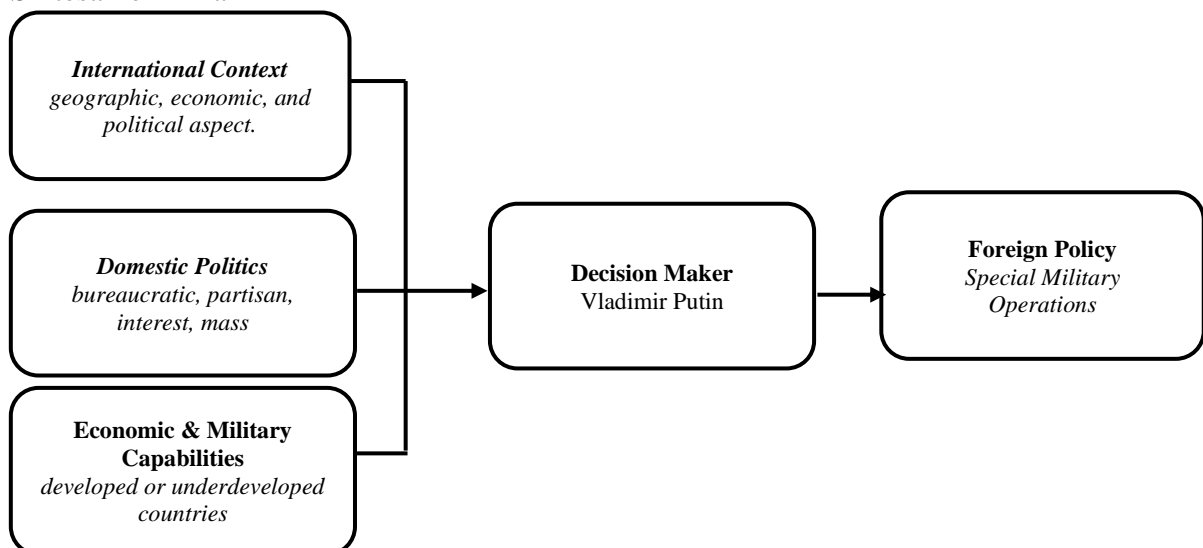
Penelitian Ivan Katchanovski (2024) menganalisis konflik Rusia-Ukraina dengan fokus utama pada transisi politik saat terjadinya Revolusi Maidan di Ukraina. Penelitian ini mencoba memahami sifat perang dan transisi politik dengan teori ilmu politik tentang perang, protes massal, revolusi, kudeta, genosida, serta perubahan rezim (Katchanovski, 2024). Penelitian lain membahas upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina dengan menggunakan teori resolusi konflik, menekankan penggunaan mediasi sebagai konsep *peacemaking*. Hasil penelitian menjelaskan faktor kegagalan resolusi konflik, diantaranya yaitu ketika pihak yang berkonflik tidak dapat menemukan kesepakatan (Izzuddin, Indrakornawan, & Stiarso, 2022). Terdapat penelitian lain dalam masalah ini yang menggunakan perspektif realisme dengan menganalisis kepentingan Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina. Penelitian ini menunjukkan adanya faktor Perjanjian Kharkiv, perlindungan kepentingan nasional Rusia, kepentingan ekonomi, kepentingan militer, serta eksistensi NATO sebagai faktor eksternal (Ornay & Azizah, 2022).

Sedangkan Rahmadhani, Bainus, Inkiriwang (2022) meneliti *gap* dalam penelitian dengan tema konflik Rusia-Ukraina dalam perspektif studi keamanan. Menggunakan *mapping studies* dan *systematic literature review*, hasil penelitian menunjukkan adanya *gap* dalam topik *security border* dan *armed conflict* (Rahmadhani, Bainus, & Inkiriwang, 2022). Penelitian terdahulu berfokus pada konsep *proxy war*, transisi politik dengan sudut pandang Ukraina, upaya penyelesaian konflik, kepentingan konflik dalam perspektif

neorealisme, dan *gap* penelitian. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian dalam sudut pandang Rusia, menggunakan teori *Foreign Policy Decision Making* dengan jangkauan penelitian di tahun 2021-2023, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai apa alasan dan kepentingan nasional Rusia dibalik kebijakan Operasi Militer Khusus di Ukraina tahun 2022. Teori *Foreign Policy Decision Making* adalah sebuah kerangka analisis yang dapat menjelaskan mengenai alasan dibalik diambilnya kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut teori ini, pemimpin atau pembuat keputusan suatu negara memiliki motif yang menjadi dasar keputusannya dalam pengambilan keputusan. William D. Coplin menyatakan bahwa pengambilan keputusan didasari oleh pertimbangan terkait konteks internasional, kondisi politik dalam negeri, serta kapabilitas ekonomi dan militer negara tersebut (Coplin, 2003). Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, teori *Foreign Policy Decision Making* dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara.

Konteks internasional membahas terkait perilaku aktor internasional di masa lalu, masa kini, atau masa depan yang kemudian diantisipasi oleh pengambil keputusan suatu negara dalam kebijakan luar negerinya. Poin ini akan membahas korelasi antara hubungan negara pengambil keputusan dan aktor lain yang terlibat dengan situasi yang sedang diantisipasi, menjelaskan urgensi atas sikap yang diambil oleh negara pengambil keputusan. Analisis akan meliputi aspek geografis, ekonomi, dan politik. Membahas letak geografis, perbatasan wilayah, hubungan ekonomi dengan negara lain, arus perdagangan, dan kondisi hubungan politik antara negara pengambil keputusan dengan aktor internasional lain yang terlibat (Coplin, 2003). Politik dalam negeri membahas mengenai kondisi politik dan sistem pemerintahan yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu negara perihal kebijakan luar negerinya. Analisis menjelaskan bagaimana pendapat dan dukungan dari *policy influencers* mempengaruhi keputusan *decision maker*, serta berkontribusi dalam stabilitas kebijakan (Coplin, 2003). *Policy influencers* yang dimaksud oleh Coplin meliputi (1) *bureaucratic influencer*, yaitu individu/organisasi lembaga eksekutif, (2) *partisan influencer*, yaitu partai politik dalam pemerintahan, (3) *interest influencer*, yaitu kelompok/organisasi informal yang memiliki kepentingan dan (4) *mass influencer*, yaitu opini masyarakat. Kapabilitas ekonomi dan militer membahas terkait kemampuan ekonomi dan militer negara pengambil keputusan, hal ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan maupun kelemahan negaranya dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Analisis kapabilitas ekonomi meliputi perolehan GNP dan GDP, serta keadaan ekspor-impor dalam neraca perdagangan. Analisis kapabilitas militer meliputi kemampuan individu militer negara, tinggi atau rendahnya tingkat ketergantungan, serta bagaimana kondisi stabilitas internal negara tersebut.

Sintesa Pemikiran



Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatif yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis keputusan Rusia dalam Operasi Militer Khusus terhadap Ukraina tahun 2022. Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Rusia. Sumber data penelitian ini meliputi data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen resmi, artikel ilmiah, laporan internasional, serta publikasi dari media yang kredibel. Instrumen penelitian utama adalah studi literatur yang terstruktur, yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan dengan teori pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, publikasi NATO, serta analisis kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga riset kredibel. Data dianalisis secara eksplanatif, menggunakan teknik analisis isi untuk memahami alasan di balik keputusan Rusia, serta bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi kebijakan tersebut. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada *Decision-Making Theory*, yang melibatkan pengidentifikasian variabel-variabel kunci seperti konteks geopolitik, kapabilitas militer dan ekonomi, serta dukungan politik domestik, untuk memahami dinamika yang melatarbelakangi keputusan Rusia melakukan operasi militer terbatas ke Ukraina.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Konteks Internasional

Konteks internasional pada penelitian ini adalah keinginan Ukraina untuk bergabung kedalam NATO, yaitu merupakan agenda Ukraina yang ingin diantisipasi oleh Rusia. Pasca bubarnya Pakta Warsawa dan reunifikasi Jerman, Amerika Serikat berjanji kepada Uni Soviet bahwa Barat tidak akan memperluas NATO ke Timur (Ginting, Hendri, Rore, Gunawan & Nugroho, 2023). Kebijakan ini kemudian berubah dan NATO melakukan *enlargement* ke Timur pasca-Perang Dingin menerima Ceko, Hongaria, dan Polandia menjadi mantan anggota Pakta Warsawa pertama yang bergabung dengan NATO. Keadaan semakin diperparah dengan perluasan selanjutnya dengan bergabungnya Estonia, Latvia, dan Lithuania yang merupakan negara Baltik ex-Soviet kedalam NATO (Mereacre, 2021).

Rusia mengalami *security dilemma* akibat meningkatnya intensitas kedekatan Ukraina dengan Amerika Serikat, memperbesar kemungkinan bergabungnya Ukraina kedalam aliansi Barat. Hal ini diakibatkan oleh persepsi Rusia terhadap NATO, yaitu aliansi pertahanan Barat yang secara terbuka menunjukkan permusuhan, menipu, dan terus-menerus terlibat dalam perang hibrida melawan Rusia (Götz & Staun, 2022). Pada topik ini Rusia bertindak rasional dengan tujuan untuk melindungi dirinya, mencegah potensi ancaman yang ditimbulkan oleh agenda Ukraina untuk bergabung dalam NATO. Dengan mempertimbangkan faktor geografis, ekonomi, dan politik, Rusia merasa perlu dilakukan upaya pencegahan yang kemudian mengarah kepada kebijakan Operasi Militer Khusus. Letak geografis Rusia berbatasan langsung dengan Ukraina, dimana Ukraina terletak ditengah antara Rusia dan negara-negara aliansi NATO.

Hal ini menjadikan Ukraina wilayah *buffer state* yang strategis dan ideal bagi Rusia, menjadi jarak penghalang bertemunya NATO dan Rusia, serta garis pertahanan dan objek *sphere of influence* Rusia. Urgensi Rusia dalam menjadikan Ukraina sebagai *buffer zone* yaitu NATO berpotensi membangun instalasi militer di negara anggotanya, yang dikhawatirkan menjadi garda terdepan dalam menyerang Rusia seperti rencana pembangunan pangkalan militer AL di Laut Azov (Kormych & Malyarenko, 2023). Sehingga, untuk menjaga keamanan wilayahnya dan menghilangkan kekhawatiran di

masa mendatang, Rusia berupaya untuk menggagalkan akses Ukraina ke dalam NATO. Dalam aspek ekonomi, Rusia memiliki peran penting bagi perekonomian dunia sebagai negara penghasil dan pegekspor minyak.

Putin menyatakan Ukraina seringkali meminta bantuan keuangan kepada Rusia sejak kemerdekaannya, tercatat selama periode 1991-2013 total mencapai estimasi \$250 miliar. Ketergantungan Ukraina terhadap Rusia juga dibuktikan dengan jumlah impor energi Ukraina, dimana 60% dari keseluruhan impor berasal dari Rusia dengan persentase bahan bakar nuklir 100%, gas alam 50%, dan minyak 70% (Polyakov, 2002). Operasi Militer Khusus mengakibatkan diberhentikannya kegiatan di Laut Hitam, menjadikan perekonomian Ukraina mengalami penurunan karena adanya hambatan transportasi, dimana Ukraina sangat bergantung pada Laut Hitam dalam pengiriman komoditasnya. Faktor-faktor tersebut memungkinkan Rusia untuk melakukan kendali atas Ukraina, mengeksploitasi adanya dependensi untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Ukraina.

Hubungan politik Rusia dan Ukraina dapat dikatakan saling berkebalikan dan seringkali berbenturan kepentingan, menjadikan konflik antar keduanya menjadi dinamis dan berkepanjangan. Putin dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina merupakan satu kesatuan, berlandaskan pada sejarah tanah mereka bahkan sejak sebelum era Soviet dan menganggap bahwa Barat telah melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri (Sidorov, 2023). Rusia beberapa kali melakukan kontrol politik dan intervensi internal atas Ukraina, diantaranya mendesak keputusan Ukraina agar sejalan dengan kepentingan Rusia, aneksasi Krimea, serta mendukung kelompok separatis Ukraina Donetsk dan Luhansk (Yigit, 2021). Ukraina ingin mempererat hubungan dengan Amerika Serikat dan bergabung dengan aliansi Barat yang beranggotakan negara-negara demokratis, disisi lain Rusia merasa agenda Ukraina berpotensi mengancam kepentingannya.

Rusia ingin mengembalikan netralitas Ukraina dengan mencegah Ukraina masuk dalam aliansi Barat, hal ini karena Rusia tidak ingin kehilangan Ukraina dari orbitnya sebagai objek *sphere of influence* miliknya (Götz & Staun, 2022). Analisis konteks internasional menunjukkan bahwa Rusia tidak ingin Ukraina bergabung ke dalam NATO yang digambarkan oleh Rusia sebagai pakta pertahanan Barat yang ofensif terhadap Rusia, sehingga agenda Ukraina tersebut menjadi konteks internasional yang kemudian ingin diantisipasi oleh Rusia. Pertimbangan aspek geografis, ekonomi, dan politik menjadi faktor pendukung tindakan *decision maker* dalam pengambilan keputusan. Dengan hasil analisis (1) Rusia ingin menjamin keamanan wilayahnya dengan memanfaatkan Ukraina sebagai *buffer zone*, (2) Adanya dependensi Ukraina terhadap Rusia dalam aspek ekonomi dan (3) Rusia ingin mengembalikan Ukraina sebagai objek *sphere of influence* ke dalam orbitnya, maka Rusia merespons agenda tersebut dengan tindakan ofensif yaitu kebijakan militer berupa Operasi Militer Khusus terhadap Ukraina.

2. Analisis Kondisi Politik Dalam Negeri Rusia

Bureaucratic influencer menunjukkan adanya dukungan dari Presiden sebagai pengambil keputusan, Menteri Luar Negeri, Wakil Dewan Keamanan, Menteri Keuangan, dan Juru Bicara Rusia. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa kebijakan Operasi Militer Khusus merupakan sebuah jawaban atas sikap Amerika Serikat dan NATO yang mengabaikan proposal tentang jaminan keamanan yang telah diajukan Rusia (Allison, 2022). Putin menyatakan bahwa Rusia memiliki hak dalam mengambil tindakan tegas, hak untuk melakukan berbagai upaya untuk menjamin keamanan nasionalnya. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mendukung pernyataan Putin dengan mengatakan kebijakan ditentukan berdasarkan keamanan Rusia. Menurut Lavrov, konflik ini adalah hasil dari upaya Amerika Serikat bersama negara satelitnya dalam memulai perang hibrida melawan Rusia.

Lavrov juga mengatakan bahwa tidak boleh ada infrastruktur militer pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Rusia, dan menunjuk permasalahan diskriminasi terhadap etnis Rusia di Ukraina (Brovina, 2024). Wakil Dewan Keamanan Federasi Rusia sekaligus mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, menyatakan bahwa tindakan Ukraina mencabut status non-blok sebagai upaya bergabung kedalam NATO menyebabkan Ukraina menjadi musuh militer Rusia. Pejabat Rusia telah lama berpendapat bahwa Rusia harus melindungi wilayahnya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya dengan menciptakan *buffer zone* (Polianskii, 2024). Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, mendukung Rusia memberlakukan kontrol modal dan pembekuan aset asing dari negara tidak bersahabat.

Langkah ini diambil sebagai balasan untuk Barat yang membekukan cadangan devisa dan aset Rusia yang bernilai \$300 miliar, serta sebagai langkah melindungi kepentingan ekonomi nasional dan stabilitas ekonomi (Victorova, 2023). Juru bicara kremlin, Maria Zakharova, merupakan loyalis Rusia dan secara aktif membela Rusia ditengah kritik dan sanksi internasional. Zakharova menyalahkan Amerika Serikat dan aliansi Barat terkait rencana agresif. Dukungan dari *Bureaucratic influencer* sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan, dimana para birokrat akan bekerjasama dengan Presiden dalam upaya memastikan kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan stabil. Sehingga, terlaksananya kebijakan Operasi Militer Khusus dipengaruhi oleh dukungan birokrasi dalam pemerintahan Rusia.

Partisan influencer terdiri dari partai politik dalam pemerintahan, dimana hasil analisis menunjukkan total 4 dukungan dari total 5 partai besar dalam parlemen Rusia, menyisakan 1 partai yaitu *New People* yang memilih untuk abstain. *United Russia* dan *Liberal-Democratic Party of Russia* (LDPR) konsisten mendukung Rusia dalam pendudukan wilayah dan pengambilan tindakan yang lebih radikal terhadap Ukraina, *Communist Party of the Russian Federation* (CPRF) dan *A Just Russia Patriots For Truth* aktif di lapangan dengan kampanye dan mengontrol wilayah Donetsk Luhansk selama delapan tahun terakhir sejak 2015. *A Just Russia* memfokuskan kontribusinya dalam aspek politik dan memimpin kedua wilayah tersebut, sedangkan CPRF memfokuskan kontribusinya dalam militer dengan bantuan senjata amunisi dan pasokan rumah sakit militer. CPRF juga diketahui aktif menjalin komunikasi dengan para tokoh milisi dari kelompok di Ukraina seperti Alexei Mozgovoi (*Prizrak*), Alexander Bednov (*Batman*), Pavel Dremov (*Cossack*), hingga Mikhail Tolstykh (Dollbaum & Kim, 2024). Dari total 5 partai dalam parlemen Rusia, 4 partai dengan kursi terbanyak dalam parlemen mendukung kebijakan Operasi Militer khusus dan menyisakan hanya partai terbawah yang memilih untuk abstain. Berdasarkan hasil penelitian, dukungan *partisan influencer* terbukti mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia, dimana partai-partai tersebut berperan dalam memberikan kontribusi baik sebelum dan setelah terjadinya konflik, hal ini mempengaruhi stabilitas terlaksananya kebijakan Operasi Militer Khusus.

Interest influencer Rusia yang terbentuk dan bergerak dalam menanggapi kebijakan Operasi Militer Khusus diantaranya terdapat kelompok *Cyber Front Z* dan Resistensi Anti-Perang Feminis. Kedua kelompok ini menanggapi kebijakan sesuai dengan kepentingan objektif-nya, saling berlawanan dan berbeda baik dalam target gerakan maupun tujuannya. *Cyber Front Z* adalah kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah yang bergerak dalam teknologi informasi atau *cyber* sesuai dengan namanya dengan memanfaatkan media sosial *Telegram* sebagai media promosi, kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut sebanyak 87 ribu di *channel*-nya. Target kelompok ini adalah masyarakat nasionalis, menyatakan menyambut semua yang peduli dan cinta tanah air tanpa terkecuali (Eggen, 2024). Terdapat juga kelompok yang menolak kebijakan, mereka menamai diri mereka sebagai Resistensi Anti-Perang Feminis.

Kelompok ini bergerak secara rahasia, menggunakan cara persuasif menargetkan ibu dan wanita paruh baya dengan pemikiran bahwa suatu saat mereka harus mengirim anaknya ke medan perang. Dalam kasus Rusia, peran *interest influencer* dibatasi oleh iklim politik dimana kelompok penolak kebijakan lebih lemah daripada kelompok yang mendukung kebijakan. Sistem otoriter Rusia menjadikan pemerintah mampu menolak tekanan dari masyarakat yang berpotensi menghambat pencapaian kepentingan nasionalnya. Dengan memanfaatkan lingkungan represif, Rusia mampu meredam perlawanan yang dilakukan oleh kelompok penolak kebijakan (Gradszkova, 2023). *Mass influencer* yaitu bagaimana opini populasi terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, masyarakat Rusia mayoritas mendukung kebijakan pemerintah dan persentase legitimasi yang tinggi mengenai kebijakan negaranya.

Pusat Penelitian Opini Publik Rusia (VSIOM) mendapatkan hasil survei terkait dukungan Operasi Militer Khusus sebanyak 71% mendukung, 21% menolak, dan 8% abstain. Lembaga Opini Publik (FOM) mendapatkan hasil survei pendapat masyarakat terkait Operasi Militer Khusus sebanyak 65% setuju, 17% tidak setuju, dan 18% abstain. Meski beberapa pihak berpendapat perolehan ini dimanipulasi oleh pemerintah Rusia, nyatanya survei independen yang dilakukan oleh aktivis oposisi Rusia Alexei Minyailo menunjukkan angka sebesar 51% suara warga Rusia menginginkan perang dan hanya 27% suara yang menentang kebijakan pemerintah. Tingginya legitimasi Rusia terbukti dalam hasil survei dimana hanya 25% suara masyarakat yang menyalahkan kebijakan pemerintah atas jatuhnya ekonomi Rusia saat ini, sisa suara terbagi 33% akibat sanksi Barat dan jatuhnya harga minyak, dan 8% suara abstain (Ginintg, Hendri, Rore, Gunawan & Nugroho, 2023).

Mayoritas masyarakat Rusia mendukung kebijakan negaranya, dan kepercayaan terhadap kebijakan Putin baik domestik maupun luar negeri juga terbilang tinggi (Ginintg, Hendri, Rore, Gunawan, & Nugroho, 2023). Meski terdapat penolakan, jumlah yang menyuarakan hal tersebut secara terbuka relatif rendah dikarenakan kemungkinan konsekuensi yang akan didapat. *Mass influencer* tidak memiliki kekuatan dalam sistem pemerintahan Rusia, meski begitu dengan mendukung kebijakan pemerintahan akan dirasa lebih aman dibandingkan menolak kebijakan pemerintahan. Hasil analisis pada poin ini yaitu benar adanya pengaruh dan kontribusi *bureaucratic influencer* dan *partisan influencer* dalam kebijakan Rusia, dimana kedua *policy influencers* tersebut berada dalam lingkup pemerintahan. Sedangkan *interest influencer* dan *mass influencer* kurang memiliki andil dalam kebijakan Rusia, hal ini karena sistem otoriter Rusia menciptakan lingkungan represif yang menekan angka protes. Dengan sistem ini pemerintah Rusia menolak pengaruh masyarakat, tidak dapat dipengaruhi oleh opini publik terkait kebijakannya dan menindak apapun yang dirasa menghambat pencapaian kepentingannya.

3. Analisis Kapabilitas Ekonomi Rusia

Berdasarkan analisis pendapatan Rusia berdasarkan GNP dan GDP, serta membandingkan dengan pendapatan Ukraina, diperoleh hasil yang menunjukkan pendapatan Rusia lebih tinggi dibandingkan dengan Ukraina. Keunggulan ini ditunjukkan sebelum dan setelah terjadinya Operasi Militer Khusus, menunjukkan kemampuan dan kestabilan Rusia meskipun terpojok oleh berbagai sanksi dan embargo. Meskipun keduanya dikategorikan dalam negara berkembang karena nilai GDP lebih tinggi dibandingkan GNP, pendapatan dan kemampuan ekonomi Rusia tetap berada diatas Ukraina. Operasi Militer Khusus membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit (Tian et al., 2023). Pernyataan ini dibuktikan dengan perkiraan anggaran militer Rusia yang melebihi 5% dari GDP-nya, dan Rusia harus memotong anggaran lain untuk

memfokuskan pengeluarannya ke keperluan militer. Kemampuan Rusia dalam mempertahankan kebijakan menunjukkan kapabilitas yang dimiliki, dimana Rusia dapat bergerak untuk kepentingannya secara independen sedangkan Ukraina terus bergantung kepada bantuan Barat untuk menandingi kekuatan Rusia.

Neraca perdagangan Rusia menunjukkan surplus tertinggi di tahun 2022, dimana *The Central Bank of the Russian Federation* menyatakan estimasi surplus Rusia sebesar \$282,3 miliar, nilai ini meningkat 66% dari tahun 2021. Surplus diakibatkan oleh turunnya nilai impor Rusia akibat sanksi dan pembatasan yang dilakukan oleh Barat, diikuti oleh menguatnya nilai ekspor minyak dan gas Rusia. Putin percaya diri dengan kekuatan energi-nya yang berperan dalam perdagangan global. Terdapat asumsi sejak lama bahwa Eropa tidak mungkin melarang energi Rusia karena dinilai sama dengan bunuh diri ekonomi (Jaffe, 2001). Keunggulan ekonomi serta fakta tentang adanya ketergantungan global terhadap sumber daya energi Rusia dinilai menjadi faktor mengapa Rusia begitu percaya diri dalam pengambilan keputusannya dan dapat menjaga stabilitas kebijakannya. Hal ini karena Rusia ‘mampu’ untuk mendanai pelaksanaan kebijakan Operasi Militer Khusus, serta membuktikan Rusia juga mampu mempertahankan perekonomiannya agar tetap kokoh berdiri ditengah hujan sanksi yang dilakukan oleh Barat, berupaya mengisolasi dan melemahkan kekuatan Rusia.

4. Analisis Kapabilitas Militer Rusia

Rusia dikenal dengan negara dengan militer yang kuat sesuai dengan statusnya sebagai penerus Uni Soviet, selain dalam lingkup global, Putin berhasil membangun kepercayaan publik terkait kekuatan militer negara tersebut. Rusia tetap stabil memiliki kekuatan dalam pertahanan negaranya dengan mengkombinasikan militer konvensional dan nuklir (Banasik, 2022). Sedangkan Ukraina menempati posisi sangat jauh di bawah Rusia. Dengan menyadari adanya keunggulan dalam aspek kekuatan militer, Rusia mengambil langkah ofensif berupa kebijakan Operasi Militer Khusus. Tingkat ketergantungan suatu negara terhadap negara lain juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan, sebelum *decision maker* menentukan kebijakan luar negerinya.

Negara dengan tingkat ketergantungan yang tinggi akan berpotensi dikendalikan oleh negara lain khususnya negara yang lebih kuat dan akan menghambat pertumbuhan negaranya, hal ini karena kebijakan negara tersebut akan menyesuaikan kepentingan negara lain dan mengesampingkan kepentingan negaranya (Coplin, 2003). Ketergantungan Rusia diantaranya terdapat pada jalur pipa gas di Ukraina, dan perusahaan tanker Amerika Serikat. Untuk dependensi jalur pipa, apabila ditutup maka meskipun Rusia mengalami penurunan pendapatan, kerugian yang lebih besar akan dirasakan oleh global khususnya Eropa (Handerson, 2024). Sedangkan untuk mengatasi sanksi *blacklist* pelayaran oleh Amerika Serikat, Rusia menggunakan *ghost fleet* dalam upaya menghindari embargo dan pembatasan harga minyak oleh Barat (Nguyen, 2023). Rusia memiliki tingkat ketergantungan yang rendah, dibuktikan dengan kepercayaan diri dan kemampuan Rusia dalam mengatasi dependensi negaranya dengan mencari alternatif lain dengan cepat.

Dengan ini kebijakan Rusia bersifat otonom, fleksibel, serta murni berdasarkan kepentingan nasionalnya tanpa mempedulikan batasan atau mendapat pengaruh dari negara lain. Kondisi stabilitas internal Rusia dapat dikatakan terlihat stabil karena sistem pemerintahan Rusia yang dipimpin oleh rezim otokratis, hal ini sejalan dengan kalimat *autocratic regimes look stable until they aren't* yang memiliki makna rezim otokratis akan selalu terlihat stabil sampai akhirnya rezim tersebut runtuh. Namun, keruntuhan rezim Putin dinilai memiliki kemungkinan yang rendah karena beberapa faktor seperti jabatan Presiden yang merangkap sebagai pemimpin angkatan bersenjata, rezim dengan

kekuasaan vertikal, eksistensi kelompok nasionalisme garis keras, serta loyalis rezim. Putin memiliki kewenangan untuk mengerahkan militer dengan tujuan melindungi kepentingan dan keamanan negaranya, rezim vertikal menjadikan Putin sebagai pusat keputusan dan titik keseimbangan kekuatan, kelompok nasionalis akan menopang rezim dan mempertahankan kekuasaan rezim Putin dengan berbagai cara, serta loyalis rezim akan menolak terjadinya penggulingan atau upaya yang dinilai dapat meruntuhkan rezim Putin. Keunggulan militer Rusia menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan Operasi Militer Khusus, dimana memang selain dana yang besar dibutuhkan juga personel dan persenjataan yang mendukung kebijakan. Dengan tingkat ketergantungan yang rendah, Rusia mampu mempertahankan stabilitas kebijakannya tanpa terpengaruh oleh ancaman atau tindakan negara lain, dan fokus pada pencapaian kepentingan nasionalnya dalam kebijakan Operasi Militer Khusus. Stabilitas internal juga berperan dalam pengambilan keputusan dan stabilitas kebijakan, dimana pemerintah dapat memfokuskan diri terhadap kebijakannya tanpa adanya ancaman kekacauan internal. Kapabilitas militer Rusia menunjukkan adanya korelasi dan menjawab alasan terkait pengambilan keputusan Rusia berupa kebijakan militer, Operasi Militer Khusus terhadap Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina tahun 2022.

Kesimpulan

Kebijakan suatu negara merupakan keputusan yang diambil oleh decision maker sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan suatu negara dapat berupa ofensif maupun defensif, menyesuaikan dengan situasi dan urgensi dari negara tersebut. Kebijakan luar negeri merupakan respons suatu negara terkait agenda politik luar negeri aktor internasional lain yang sedang atau ingin diantisipasi oleh negara pengambil keputusan, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti letak geografis, kondisi ekonomi, dan hubungan politik. Untuk mendukung keberhasilan dan kestabilan kebijakan, *decision maker* juga harus memperhatikan bagaimana kapabilitas ekonomi dan militer negaranya seperti kondisi GNP dan GDP, arus dan neraca perdagangan, kapasitas militer, tingkat ketergantungan negaranya terhadap negara lain, serta kondisi stabilitas internal negaranya. Rusia, dengan Presiden Vladimir Putin sebagai *decision maker*, memutuskan untuk mengambil kebijakan militer (ofensif) terhadap Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. Kebijakan luar negeri Rusia tersebut berupa Operasi Militer Khusus merupakan bentuk antisipasi Rusia atas tindakan Ukraina yang menyatakan ingin bergabung kedalam NATO, merasa agenda tersebut dapat berpotensi mengancam keamanan negaranya dan mengganggu kepentingan nasionalnya. Bergabungnya Ukraina kedalam NATO akan sangat merugikan Rusia karena selain kehilangan netralitas Ukraina dan secara otomatis menggagalkan pembentukan wilayah *buffer zone*, agenda ini juga semakin mendekatkan NATO ke perbatasan Rusia. Saat ini wilayah perbatasan Rusia telah dikelilingi oleh negara aliansi NATO dan Ukraina berperan sebagai garis batas pertahanan Rusia, apabila Ukraina resmi menjadi anggota NATO maka besar kemungkinan terjadi pembangunan infrastruktur militer di perbatasan Ukraina yang kemudian akan menjadi front terdepan Barat dalam menyerang Rusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rusia mengalami *security dilemma* dalam agenda Ukraina dan NATO, merasakan adanya *possibility threat* dan merespons dengan Operasi Militer Khusus yang dianggap ideal dalam menggagalkan agenda tersebut. Berdasarkan hasil analisis, kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Rusia diantaranya adalah gagalnya akses Ukraina kedalam NATO, mengembalikan netralitas Ukraina dan menjaga Ukraina agar tetap dalam orbitnya sebagai objek *sphere of influence* Rusia, penghentian aktivitas militer NATO di Eropa Timur, serta menjaga keamanan nasional Rusia khususnya wilayah yang berbatasan dengan negara lain.

Daftar Pustaka

- Allison, R. (2022). Russia, Ukraine and State Survival through Neutrality. *International Affairs*, 98(6), 1849–1872 .
- Banasik, M. (2022). The Russian Federation Dominance. *Polish Political Science Yearbook*, 51(3), 7–17.
- Brovina, B. (2024). Platforms Of Expansionism: A Comparison Of Russia's Narratives For Ukraine And Serbia's Narratives For Kosovo. *Octopus Journal: Hybrid Warfare & Strategic Conflicts*, 2, 1-22.
- Coplin, W. (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaahan Teoritis*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Dollbaum, J. M., & Kim, S. (2024). Going Jingo: A Classification Of The Wartime Positions Of Russia’s “Systemic Opposition” Parties. *Post-Soviet Affairs*, 40(3), 222–241.
- Eggen, K. A. (2024). Designing Around Nato’s Deterrence: Russia’s Nordic Information Confrontation Strategy. *Journal of Strategic Studies*, 47(3), 410–434.
- Gerlach, I., & Ryndzak, O. (2022). Ukrainian Migration Crisis Caused by the War. *Studia Europejskie-Studies in European Affairs*, 26(2), 17-29.
- Ginintg, Y., Hendri, R. R. S., Gunawan, H., & Nugroho, S. (2023). *Perang Rusia vs Ukraina: Perspektif Intelien Strategies*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Götz, E., & Staun, J. (2022). Why Russia attacked Ukraine: Strategic Culture And Radicalized Narratives. *Contemporary Security Policy*, 43(3), 482-497.
- Gradskova, Y. (2023). Maternalism And New Imperialism In Russia: Good Mothers For A Militarizing State Expectations, Implications, And Resistances. *Frontiers in Sociology*, 8, 1192822.
- Henderson, J. (2024). The Impact Of The Russia-Ukraine War on Global Gas Markets. *Current Sustainable/Renewable Energy Reports*, 11(1), 1-9.
- Izzuddin, A., Indrakorniawan, R., & Stiarso, H. A. (2022). Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia - Ukraina Tahun 2022. *Pena Wimaya*, 2(2), 2-17.
- Jaffe, A. M. (2001). Russia, Energy And The West. *Survival*, 43(2), 133-152.
- Katchanovski, I. (2024). *The Maidan Massacre in Ukraine*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Kormych, B., & Malyarenko, T. (2023). From Gray Zone To Conventional Warfare: The Russia-Ukraine Conflict In The Black Sea. *Small Wars & Insurgencies*, 34(7), 1235–1270.
- Maitra, S. (2021). NATO Enlargement, Russia, and Balance. *Canadian Military Journal*, 21(3), 35-46.
- Mereacre, A. (2021). The Baltic States–Between NATO’s Protection and Russia’s Threat. *Romanian Military Thinking*, (3), 158-181.
- Nguyen, T. (2023). The Challenges of Dark Ships To The Safety And Security Of Commercial Shipping And The Way Forward. *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, 8, 310-328.
- Ornay, E. S., & Azizah, N. (2022). Kepentingan Keamanan Nasional Rusia dalam Serangan Militer terhadap Ukraina Tahun 2022. *Jurnal Communitarian*, 4(1), 565-579.
- Polianskii, M. (2024). Russian Foreign Policy Research and War in Ukraine: Old Answers to New Questions?. *Communist and Post-Communist Studies*, 1-17.
- Polyakov, L. (2002). Current Russian-Ukrainian Rapprochement: Forward or Backward? A Rejoinder. *Security Dialogue*, 33(2), 171-176.
- Quilim, N. (2022). *Proxy War Rusia dan Amerika Serikat dalam Konflik Internal Ukraina*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Rahmadhani, T. P., Bainus, A., Inkiriwang, F. F. (2022). Perang Rusia & Ukraina dalam Perspektif Security Studies: Pemetaan Research Agenda Menggunakan Systematic Mapping Studies dan Systematic Literature Review. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 6(2), 97-110.
- Sidorov, V. (2023). Vladimir Putin's Views On The Russian Nation And Russian History As The Reason For The Aggression Against Ukraine. *Studia Ethnologica Pragensia*, (2), 39-60.
- Tian, N., Silva, D. L., Béraud, S. L., Lianga, X., Scarazzatoa, L., & Assis, A. (2023). Developments in Military Expenditure And The Effects Of The War In Ukraine. *Defence and Peace Economics*, 34(5), 547-562.
- Victorova, N. (2023). Foreign Investments In The Russian Federation During The Period Of Sanctions: Restrictions Imposed And Their Correlation With The Rights Of Foreign Investors. *Courier of Kutafin Moscow State Law University*, (9), 66-75.
- Yiğit, S. (2021). Donetsk Remains Under Duress: The Occupation Of Eastern Ukraine. *DergiPark*, 10(2), 203-217.